



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YOKI JILIANSYAH**
2. Jabatan : **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**
3. NHK : **975738**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/72 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/30 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 383 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 259.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5D EXCEED Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SY 415 BALENO DX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2S6 JUFITER MX 135 CC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 100 D (SUPRA X) Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO M3 - SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, HONDA NINO2Q43LI A/T - ADV Tahun 2022, HASIL



SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.549.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.549.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



IKHTISAR LHKPN a.n EKO ARGO SANTOSO
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2025)
NIK 6405020604880001

1. DATA PRIBADI

Nama	:	EKO ARGO SANTOSO
NIK	:	6405020604880001
No KK	:	6405020609110001
NPWP	:	6405020604880001
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	LUMAJANG/6 April 1988
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	Jl. Ppabri gang syukur 2 rt 18, TARAkan TENGAH, KOTA TARAkan, KALIMANTAN UTARA
Nomor Handphone	:	081253219055
Email	:	ekopeg@gmail.com
NHK	:	1016135
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jabatan	:	BENDAHARA PENGELUARAN - STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAkan - DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tanggal Lapo	:	31 Desember 2025
Tanggal Kirim	:	12 Maret 2026
Status	:	Terverifikasi Lengkap



2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	YULIANTI	ISTRI	NUNUKAN , 4 Juli 1988 / PEREMPUAN	IBU RUMAH TANGGA	Jl. Ppabri gang syukur 2

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	BENDAHARA PENGELUARAN	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : SCOOPY Tahun Pembuatan : 2017 No. Pol. / Registrasi : KU 2271 NG	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (YULIANTI) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	UBAH



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Lainnya : - Tahun Perolehan: 2018			
Sub Total				Rp. 6.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : PAKET Ket. Lainnya : PERALATAN RUMAH TANGGA Tahun Perolehan: 2025	HASIL SENDIRI	Rp. 0	Rp. 2.000.000	BARU
2	Jenis : PERHIASAN & LOGAM/BATU MULIA Jumlah : 1 Satuan : 5 Ket. Lainnya : - Tahun Perolehan: 2024	HASIL SENDIRI	Rp. 8.255.588	Rp. 10.000.000	UBAH
3	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Setrika listrik Tahun Perolehan: 2023	HASIL SENDIRI	Rp. 10.000	Rp. 10.000	TETAP
4	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Handphone reno 6	HASIL SENDIRI	Rp. 500.000	Rp. 500.000	TETAP



NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Tahun Perolehan: 2022				
5	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Handphone poco x6pro Tahun Perolehan: 2024	HASIL SENDIRI	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	UBAH
6	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Rice cooker Tahun Perolehan: 2017	HASIL SENDIRI	Rp. 100.000	Rp. 100.000	TETAP
7	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : coffee makers Tahun Perolehan: 2021	HASIL SENDIRI	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	TETAP
8	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Oven listrik Tahun Perolehan: 2017	HASIL SENDIRI	Rp. 500.000	Rp. 500.000	TETAP
9	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Mesin cuci Tahun Perolehan: 2015	HASIL SENDIRI	Rp. 350.000	Rp. 350.000	TETAP



NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
10	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Lemari es Tahun Perolehan: 2014	HASIL SENDIRI	Rp. 750.000	Rp. 750.000	TETAP
11	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : Televisi Tahun Perolehan: 2012	HASIL SENDIRI	Rp. 500.000	Rp. 500.000	TETAP
Sub Total				Rp. 17.210.000	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total					Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : UANG TUNAI Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : -	Nomor : - Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 2.000.000	UBAH
Sub Total				Rp. 2.000.000	



4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
Sub Total				Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BSI	SK PEGAWAI	Rp. 350.000.000	Rp. 300.000.000
2	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	MANDIRI	-	Rp. 64.000.000	Rp. 40.697.256
Sub Total				Rp. 414.000.000	Rp. 340.697.256

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 9.351.600	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
3	Honorarium	Rp. 660.000	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 7.403.100	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 17.414.700	Rp. 0

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 24.480.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 0
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 0
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 48.000.000
Sub Total		Rp. 72.480.000



6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
----	--------	------------------------------	------------

**8. TOTAL HARTA KEKAYAAN**

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 25.210.000	Rp. 340.697.256	Rp. -315.487.256

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.